

ANALISIS MANAJEMEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN TAIPA KECAMATAN PALU UTARA

Farham¹, Rudin.M², Muh.Darma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu
Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah

Email; rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menentukan dan menganalisis pengelolaan Program Keluarga Harapan di Masyarakat Desa Taipa, Kecamatan Palu Utara. (2) untuk menentukan dan menganalisis Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Masyarakat Desa Taipa, Kecamatan Palu Utara. (3) untuk menentukan dan menganalisis Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Masyarakat Desa Taipa, Kecamatan Palu Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 5 informan. Faktor penghambat dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Taipa, Kecamatan Palu Utara meliputi pembaruan data KPM yang tidak akurat dan terlambat, jumlah dan kapasitas fasilitator yang terbatas, literasi keuangan dan pemahaman administrasi masyarakat yang rendah, kendala koordinasi antar aktor, dan kecemburuan sosial dari warga non-penerima. 3) Faktor pendukung dalam pengelolaan Program Harapan Keluarga (PKH) di Desa Taipa, Kecamatan Palu Utara meliputi dukungan aktif dari pejabat desa dan RT/RW, koordinasi yang baik antara fasilitator, desa, dan masyarakat, partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kegiatan pembangunan, dan sistem distribusi bantuan non-tunai yang transparan.

Kata kunci: Pengelolaan, Program Harapan Keluarga dan Masyarakat

ABSTRACT

The objectives of this study are (1) to determine and analyze the management of the Family Hope Program in the Community in Taipa Village, North Palu District. (2) to determine and analyze the Inhibiting Factors in the Management of the Family Hope Program in the Community in Taipa Village, North Palu District. (3) to determine and analyze the Supporting Factors in the Management of the Family Hope Program in the Community in Taipa Village, North Palu District. This type of research is qualitative research with 5 informants. Inhibiting factors in the management of the Family Hope Program (PKH) in Taipa Village, North Palu District include inaccurate and late updates of KPM data, limited number and capacity of facilitators, low financial literacy and administrative understanding of the community, coordination constraints between actors, and social jealousy from non-recipient residents. 3) Supporting factors in the management of the Family Hope Program (PKH) in Taipa Village, North Palu District include active support from village officials and RT/RW, good coordination between facilitators, the village, and the community, participation of Beneficiary Families (KPM) in development activities, and a transparent non-cash assistance distribution system.

Keywords: *Management, Family Hope Program and Community*

A. PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palu Sulawesi Tengah bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong perubahan perilaku yang mendukung keberlanjutan.¹ PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima

¹ Annissa, F. N., Kushartono, T., & Fauzi, L. M. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa. Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung. Barat. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).

Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH sebagai wujud salah satu implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam konteks perlindungan sosial yang telah digulirkan pemerintah sejak 2007.

Program PKH ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan melakukan perubahan perilaku KPM, sehingga mereka dapat memanfaatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan taraf kehidupan KPM melalui aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Membantu KPM untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan mengurangi beban pengeluaran dan Mendorong perubahan perilaku KPM agar dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. PKH di Kota Palu Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan keluarga.²

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palu tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka. Program Keluarga Harapan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Program Keluarga Harapan diberikan kepada masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

² Arsyad, L. 2007. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ke 4*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Penerimanya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah atau masyarakat miskin.

Masyarakat miskin sangat membutuhkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palu untuk meringankan kesulitan ekonominya. Inilah potret nyata di lapangan tentang keadaan masyarakat yang sebenarnya. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara berkembang. Kemiskinan merupakan ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS 2019). Secara umum, pada periode September 2006-2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini terlihat bahwa program Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya pada periode tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palu yang telah diprogramkan oleh pemerintah dapat menurunkan jumlah dan persentase angka kemiskinan di Indonesia.³

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Taipa Kota Palu dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Melihat dari program pemerintah tersebut, upaya pemberantasan kemiskinan di Kota Palu ini cukup menarik simpati masyarakat. di Kelurahan Taipa Kota Palu Masyarakat awam beramai-ramai memuji pemerintah atas program ini. Tidak

³ Faisal, Sanapiah, 2013 *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

mengherankan jika kemudian masyarakat pada taraf kategori mampu pun ikut menjadikan diri sebagai sasaran PKH.

Berdasarkan penelitian awal menunjukkan bahwa fungsi PKH bukan hanya membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi orang menggunakannya untuk hal yang kurang penting. Seperti masyarakat miskin biasanya uang PKH tersebut digunakan untuk membeli baju atau sepatu. Intinya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang dirasa kurang penting untuk kebutuhan mereka. Selain fungsi yang disalahgunakan, validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana PKH kepada masyarakat yang berhak. Seringkali data untuk persyaratan tersebut dipalsukan, maka bukan orang miskin lagi menerima bisa saja orang lain.⁴

Pemerintah Kelurahan Taipa Kota Palu menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Tujuan penanggulangan kemiskinan antara lain, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk dan rumah tangga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, pelayanan akses perumahan dan pemukiman, penyediaan akses pelatihan modal usaha dan penanaman hasil usaha. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar

⁴ Handoko, T. Hani, 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta

belakang maka menarik dilakukan penelitian karya ilmiah berupa Tesis dengan judul Analisis Manajemen Program Keluarga Harapan Pada Masyarakat Di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Manajemen Program Keluarga Harapan Pada Masyarakat Di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara ?
- 2) Apa faktor penghambat Manajemen Program Keluarga Harapan Pada Masyarakat Di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendiskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵ Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kelurahan Taipa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat permasalahan yang menarik untuk dilakukan penelitian yaitu Program Keluarga

⁵ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Harapan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2025.

D. PEMBAHASAN

1. Analisa Manajemen Program Keluarga Harapan Pada Masyarakat Di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen utama kebijakan perlindungan sosial di Indonesia yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bentuk intervensi pemerintah melalui skema bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer). PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin, tetapi juga mensyaratkan pemenuhan komitmen di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, PKH memiliki dua orientasi utama, yaitu perlindungan sosial jangka pendek dan pemberdayaan jangka panjang.⁶

Dalam konteks Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, pelaksanaan PKH menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, serta dinamika pascabencana dan perubahan struktur ekonomi daerah, menuntut adanya manajemen program yang efektif. Keberhasilan PKH di wilayah ini sangat ditentukan oleh bagaimana fungsi manajemen dijalankan, yakni melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan fondasi utama dalam manajemen program, karena pada tahap inilah arah, strategi, dan target kegiatan ditentukan. Dalam teori manajemen klasik, perencanaan dipahami sebagai proses sistematis dalam menetapkan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya, sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry yang menekankan pentingnya penentuan tujuan dan kebijakan sebelum tindakan dilaksanakan. Dalam konteks PKH di Kelurahan Taipa, perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Tahap awal perencanaan PKH adalah identifikasi dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses ini melibatkan koordinasi antara pendamping PKH dan aparat kelurahan untuk melakukan verifikasi serta validasi data di lapangan. Ketepatan sasaran menjadi indikator penting keberhasilan perencanaan, karena kesalahan dalam pendataan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan konflik di masyarakat.⁷

Di Kelurahan Taipa, dinamika sosial seperti perpindahan penduduk, perubahan pekerjaan, serta fluktuasi pendapatan keluarga sering kali memengaruhi akurasi data. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan unsur RT/RW agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi riil masyarakat. Selain pendataan, perencanaan juga mencakup penyusunan jadwal

⁷ Rudin,M, MLF Bakarbesy, Effectiveness of Additional Employee Income Policy at . the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

kegiatan pendampingan dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kegiatan ini dirancang sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan KPM. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan ibu dan anak, pentingnya pendidikan, serta penguatan ekonomi produktif. Perencanaan yang matang memastikan kegiatan P2K2 dapat dilaksanakan secara berkala dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Perencanaan PKH di Kelurahan Taipa juga mencerminkan pendekatan kolaboratif, di mana koordinasi dilakukan dengan sekolah dan fasilitas kesehatan untuk memantau kepatuhan KPM terhadap komitmen program. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan, tetapi juga pada pencapaian tujuan jangka panjang berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan tahap pengaturan sumber daya manusia dan non-manusia agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam PKH, struktur organisasi telah ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan. Namun, dalam praktiknya di Kelurahan Taipa, efektivitas pengorganisasian sangat bergantung pada koordinasi antaraktor di tingkat lokal.⁸

Pendamping PKH memegang peran sentral sebagai pelaksana teknis di lapangan. Mereka bertugas melakukan sosialisasi program, memverifikasi data, mendampingi KPM, serta melaksanakan P2K2.

⁸ Rudin M, BMLF, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance from the Perspective of Regional Fiscal Management, JURNAL ILMIAH MANAJEMEN KESATUAN 3 (13), 1891-1900

Kejelasan pembagian tugas antara pendamping dan aparat kelurahan menjadi kunci keberhasilan pengorganisasian. Aparat kelurahan berfungsi sebagai fasilitator administratif dan mediator sosial ketika muncul permasalahan di masyarakat.

Pengorganisasian yang efektif terlihat dari adanya komunikasi yang rutin dan terstruktur antara pendamping, pemerintah kelurahan, serta pihak sekolah dan fasilitas kesehatan. Pola komunikasi ini memungkinkan penyelesaian masalah dilakukan secara cepat dan tepat. Misalnya, ketika terdapat KPM yang tidak memenuhi komitmen pendidikan, pendamping dapat segera berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengetahui penyebabnya.

Namun demikian, tantangan pengorganisasian di Kelurahan Taipa adalah keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan dengan jumlah KPM yang harus didampingi. Beban kerja yang cukup tinggi berpotensi memengaruhi intensitas pendampingan dan kualitas interaksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan dukungan administratif yang memadai agar pendamping dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Secara konseptual, pengorganisasian PKH di Taipa menunjukkan penerapan prinsip manajemen publik yang menekankan pada koordinasi lintas sektor dan pembagian tugas yang jelas. Keberhasilan pengorganisasian sangat ditentukan oleh sinergi dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan program.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap implementasi dari rencana yang telah disusun. Dalam PKH, pelaksanaan mencakup penyaluran bantuan sosial, pemantauan pemenuhan komitmen, serta kegiatan pemberdayaan keluarga. Penyaluran bantuan dilakukan secara non-

tunai melalui sistem perbankan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di Kelurahan Taipa, sistem ini relatif berjalan dengan baik, meskipun pada tahap awal terdapat kendala literasi keuangan, khususnya bagi KPM lanjut usia. Pendamping berperan aktif memberikan pendampingan teknis terkait proses pencairan bantuan agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.⁹

Selain penyaluran bantuan, pelaksanaan PKH juga menuntut kepatuhan KPM terhadap komitmen program. Anak-anak dari keluarga penerima diwajibkan bersekolah secara rutin, sementara ibu hamil dan balita harus menjalani pemeriksaan kesehatan berkala. Di Taipa, secara umum tingkat kepatuhan cukup baik, namun faktor ekonomi tambahan seperti kebutuhan membantu orang tua bekerja masih menjadi kendala bagi sebagian anak. Kegiatan P2K2 menjadi elemen penting dalam pelaksanaan PKH. Melalui forum ini, pendamping tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kemandirian ekonomi. Pendekatan partisipatif yang diterapkan memungkinkan KPM berbagi pengalaman dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, pelaksanaan PKH tidak sekadar bersifat distributif, tetapi juga transformatif. Pelaksanaan yang efektif di Kelurahan Taipa menunjukkan adanya perubahan pola pikir sebagian KPM yang mulai memanfaatkan bantuan untuk kegiatan produktif, seperti usaha kecil skala rumah tangga. Meskipun belum

⁹ Syaifudin, M. (2025). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan

merata, indikasi ini menunjukkan bahwa PKH memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan sosial ekonomi.¹⁰

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam PKH di Kelurahan Taipa, pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari pendamping, koordinator wilayah, hingga pengawasan administratif melalui sistem digital. Pendamping melakukan monitoring rutin terhadap kehadiran anak di sekolah dan kepatuhan kunjungan kesehatan. Data tersebut dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari evaluasi berkala. Jika ditemukan pelanggaran komitmen, maka diberikan teguran atau sanksi sesuai ketentuan program. Pengawasan juga mencakup aspek transparansi dalam penyaluran bantuan. Sistem non-tunai membantu meminimalkan potensi penyimpangan. Namun, kendala teknis seperti gangguan jaringan atau keterbatasan akses teknologi masih menjadi tantangan dalam pelaporan digital.

Selain pengawasan administratif, aspek sosial juga menjadi perhatian. Kecemburuan sosial dari warga yang tidak terdaftar sebagai KPM dapat memicu konflik. Dalam hal ini, pemerintah kelurahan berperan penting memberikan penjelasan terkait kriteria penerima bantuan agar tercipta pemahaman bersama. Pengawasan yang konsisten membantu menjaga integritas program dan memastikan bahwa tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat

¹⁰ Siregar, Syofian, 2020. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

dapat tercapai. Dengan pengawasan yang baik, PKH di Kelurahan Taipa dapat berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan.¹¹

Secara keseluruhan, manajemen PKH di Kelurahan Taipa menunjukkan bahwa fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang baik menjadi dasar pengorganisasian yang efektif; pengorganisasian yang jelas mendukung pelaksanaan yang optimal; dan pengawasan yang konsisten memastikan program tetap berada pada jalur yang benar. Meskipun masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dinamika sosial ekonomi masyarakat, dan tantangan teknis, pelaksanaan PKH di Kelurahan Taipa dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, penguatan kapasitas pendamping, peningkatan kualitas data, serta optimalisasi pendekatan pemberdayaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas manajemen program. Dengan manajemen yang semakin profesional dan partisipatif, Program Keluarga Harapan di Kelurahan Taipa memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan pembangunan sosial yang berkelanjutan di Kecamatan Palu Utara.

2. Faktor Penghambat Manajemen Program Keluarga Harapan Pada Masyarakat Di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

¹¹ Tambunan, T. 2006. *Development Of Small and Medium Scale Industry Clusters In Indonesia*. Kadin Indonesia-Jetro.

melalui bantuan sosial bersyarat. Program ini dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan diimplementasikan hingga tingkat daerah melalui koordinasi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Palu.¹² Di wilayah Palu, khususnya Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara, PKH telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas manajemen program. Pembahasan ini mengkaji faktor-faktor penghambat tersebut berdasarkan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. Faktor Penghambat dalam Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan program. Dalam konteks PKH di Kelurahan Taipa, salah satu faktor penghambat utama adalah ketidakakuratan dan keterlambatan pembaruan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data penerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun dalam praktiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat sering mengalami perubahan yang cepat. Misalnya, terdapat keluarga yang sebelumnya tergolong miskin namun telah mengalami peningkatan pendapatan, atau sebaliknya, terdapat keluarga yang baru mengalami penurunan kondisi ekonomi tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Ketidaksesuaian ini menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat dan dapat memicu kecemburuan sosial.

¹² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Selain itu, proses verifikasi dan validasi data memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kelurahan dan pendamping membuat proses pembaruan data tidak selalu dapat dilakukan secara optimal dan berkala. Hal ini menjadi hambatan struktural dalam tahap perencanaan.

Faktor lain yang menghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria penerima PKH. Sebagian warga menilai kelayakan hanya berdasarkan pengamatan kasat mata tanpa memahami indikator kemiskinan yang digunakan pemerintah. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh menyebabkan munculnya asumsi subjektif dan tekanan sosial terhadap aparat kelurahan maupun pendamping.

Dengan demikian, hambatan dalam tahap perencanaan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga bersifat sosial dan komunikatif.

2. Faktor Penghambat Dalam Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam PKH melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping PKH, pemerintah kelurahan, hingga RT/RW. Salah satu faktor penghambat utama dalam aspek ini adalah keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan dengan jumlah KPM yang harus didampingi.

Di Kelurahan Taipa, satu pendamping sering kali harus menangani puluhan bahkan ratusan keluarga penerima manfaat. Beban kerja yang tinggi berdampak pada terbatasnya intensitas pendampingan, terutama dalam kegiatan pembinaan dan kunjungan rumah. Akibatnya, fungsi pemberdayaan yang menjadi salah satu tujuan utama PKH belum sepenuhnya optimal. Selain itu, hambatan koordinasi juga menjadi tantangan. Meskipun secara struktural

terdapat pembagian tugas yang jelas, dalam praktiknya komunikasi antaraktor terkadang mengalami kendala, terutama ketika terdapat perubahan kebijakan atau jadwal pencairan bantuan yang bersifat mendadak. Informasi yang tidak tersampaikan secara merata dapat menimbulkan kesalahpahaman di tingkat masyarakat.¹³

Faktor lain adalah keterbatasan kapasitas administratif di tingkat kelurahan. Tidak semua aparat memiliki pemahaman teknis yang mendalam mengenai mekanisme PKH, sehingga dalam beberapa kasus diperlukan waktu tambahan untuk menjelaskan prosedur kepada masyarakat. Hal ini dapat memperlambat proses pelayanan dan penanganan keluhan. Dengan demikian, hambatan pengorganisasian bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, serta koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya efektif.

3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, hambatan yang paling sering muncul adalah rendahnya literasi keuangan dan pemahaman administratif sebagian KPM**, khususnya kelompok lanjut usia. Sistem penyaluran bantuan non-tunai melalui perbankan memang bertujuan meningkatkan transparansi, namun bagi sebagian masyarakat, mekanisme ini masih dianggap rumit.

Kesulitan dalam mengakses layanan perbankan, lupa PIN, atau kurangnya pemahaman mengenai prosedur pencairan sering menjadi kendala teknis. Dalam beberapa kasus, KPM harus dibantu oleh anggota keluarga lain atau pendamping untuk mencairkan bantuan.

¹³ Tambunan, T. 2006, 2007b. *The Role of Government in Technology Transfer to SME Clusters in Indonesia: Micro-level Evidence from The MetalWorking Industry Clusters in Tegal. (CentralJava)*. Asia-Pacific Perspective, VII (1).

Selain itu, terdapat hambatan dalam pemenuhan komitmen pendidikan dan kesehatan. Faktor ekonomi tambahan, seperti kebutuhan membantu orang tua bekerja, masih menyebabkan sebagian anak tidak hadir secara rutin di sekolah. Di sisi lain, kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala juga belum sepenuhnya optimal.¹⁴

Hambatan lainnya adalah pola ketergantungan terhadap bantuan sosial. Meskipun PKH dirancang sebagai program pemberdayaan, masih terdapat KPM yang menganggap bantuan sebagai sumber pendapatan utama tanpa upaya meningkatkan kemandirian ekonomi. Pola pikir ini menjadi tantangan dalam mencapai tujuan jangka panjang program, yaitu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Keterbatasan sarana pendukung kegiatan P2K2 juga menjadi faktor penghambat. Fasilitas pertemuan yang kurang memadai atau jadwal yang berbenturan dengan aktivitas ekonomi warga dapat mengurangi partisipasi KPM dalam kegiatan pembinaan.

4. Faktor Penghambat dalam Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Namun, dalam pelaksanaannya di Kelurahan Taipa, terdapat beberapa hambatan.

Pertama, keterbatasan waktu dan jangkauan pendamping dalam melakukan monitoring rutin. Dengan jumlah KPM yang cukup banyak, tidak semua keluarga dapat dipantau secara intensif. Hal ini

¹⁴ Todaro, M. C., Choudhuri, I., Belohlavek, M., Jahangir, A., Carerj, S., Oreto, L., & Khandheria, B. K. (2012). New echocardiographic techniques for evaluation of left atrial mechanics. *European Heart Journal–Cardiovascular Imaging*, 13(12), 973-984.

berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi pelanggaran komitmen.

Kedua, hambatan teknis berupa gangguan jaringan internet atau kendala sistem digital dalam pelaporan administrasi. Sistem pelaporan berbasis teknologi memang meningkatkan efisiensi, namun apabila terjadi gangguan, proses pelaporan dapat tertunda.

Ketiga, kecemburuan sosial dari masyarakat non-penerima menjadi hambatan sosial dalam pengawasan. Terdapat warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, sehingga muncul keluhan atau kritik terhadap aparat kelurahan dan pendamping. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat memicu konflik sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program.

Selain itu, mekanisme sanksi terhadap KPM yang tidak memenuhi komitmen terkadang sulit diterapkan secara tegas karena pertimbangan kondisi sosial ekonomi keluarga. Pendekatan persuasif lebih sering digunakan, namun efektivitasnya bergantung pada kesadaran individu penerima manfaat.¹⁵ Secara umum, faktor penghambat manajemen PKH di Kelurahan Taipa dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok besar:

1. Hambatan Struktural dan Administratif

Meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ketidakakuratan data, serta kendala teknis dalam sistem pelaporan.

2. Hambatan Sosial dan Budaya

Meliputi persepsi subjektif masyarakat, kecemburuan sosial, serta pola ketergantungan terhadap bantuan.

3. Hambatan Kapasitas dan Literasi

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Meliputi rendahnya literasi keuangan dan pemahaman administratif sebagian KPM.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas fungsi manajemen secara keseluruhan. Meskipun demikian, hambatan-hambatan tersebut bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi, melainkan memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, serta pendekatan komunikasi yang lebih intensif.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen Program Keluarga Harapan di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara menghadapi berbagai faktor penghambat dalam setiap fungsi manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Hambatan tersebut bersifat teknis, struktural, maupun sosial. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain peningkatan akurasi data melalui pembaruan berkala, penambahan atau penguatan kapasitas pendamping, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria dan mekanisme program, serta penguatan pendekatan pemberdayaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dengan pengelolaan yang lebih adaptif dan partisipatif, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalkan sehingga PKH dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Taipa secara berkelanjutan.¹⁶

E. KESIMPULAN

1. Manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pengorganisasian melibatkan pendamping, aparat kelurahan, dan RT/RW, pelaksanaan mencakup penyaluran bantuan non-tunai serta kegiatan pembinaan keluarga, dan pengawasan dilakukan secara rutin melalui monitoring administratif dan sosial. Meskipun program memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan pendamping, akurasi data, literasi keuangan KPM, dan kecemburuan sosial. Secara keseluruhan, PKH di Kelurahan Taipa berjalan efektif, namun perlu penguatan koordinasi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja program secara berkelanjutan.
2. Faktor penghambat manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara meliputi ketidakakuratan dan keterlambatan pembaruan data KPM, keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping, rendahnya literasi keuangan dan pemahaman administratif masyarakat, kendala koordinasi antaraktor, serta kecemburuan sosial dari warga non-penerima. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program, meskipun secara keseluruhan PKH tetap memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

F. SARAN

Saran operasional terkait Manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara :

1. Penguatan Kapasitas Pendamping dan Aparat Kelurahan

Disarankan untuk menambah jumlah pendamping atau memberikan pelatihan berkala bagi pendamping dan aparat kelurahan agar mampu melakukan pendataan, verifikasi, dan pembinaan KPM secara lebih efektif. Hal ini akan meningkatkan kualitas pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program sehingga setiap KPM mendapat pendampingan yang memadai.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Literasi Masyarakat

Diperlukan program sosialisasi yang rutin mengenai prosedur, kriteria penerima PKH, serta pemanfaatan bantuan secara produktif. Selain itu, kegiatan literasi keuangan dan edukasi keterampilan keluarga penerima manfaat perlu diperkuat agar bantuan PKH tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

3. Mempertahankan dan Meningkatkan Koordinasi OPD

Diharapkan kelurahan, pendamping PKH, dan RT/RW terus menjaga komunikasi rutin dan koordinasi yang sudah baik. Misalnya melalui pertemuan berkala atau grup komunikasi resmi, sehingga informasi tentang program, jadwal pencairan, dan kegiatan pembinaan sampai ke seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cepat dan tepat.

DAFTAR RUJUKAN

- Annissa, F. N., Kushartono, T., & Fauzi, L. M. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa. Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung. Barat. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Arsyad, L. 2007. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ke 4*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Direktorat Jaminan Sosial, 2023, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial. Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*.
- Faisal, Sanapiah, 2013 *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Handoko, T. Hani, 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Iping Baso. (2020). *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial*.
- Ismawan, B., dan S. Budiantoro. 2005. *Keuangan Mikro: Sebuah Revolusi Tersembunyi dari Bawah*. Jakarta: Penerbit Gema PKM Indonesia.
- Karina, P., & Yusuf, A. (2025). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(1), 64-81.
- Kotler, P. 2006. *Manajemen Pemasaran: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Mahmudah, R. A., Baihaqi, A., & Jumaidi, J. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 411-422.

- Maman Abdul Rahman, Sambas, Ali Muhidin 2017, *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Moetheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan. Sosial.
- Rudin,M, MLF Bakarbesy, Effectiveness of Additional Employee Income Policy at . the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat, Jurnal Ilmiah Manajemen . Kesatuan 13 (5), 3663-3674
- Rudin M, BMLF, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance from the Perspective of Regional Fiscal Management, JURNAL ILMIAH . MANAJEMEN KESATUAN 3 (13), 1891-1900
- Syaifudin, M. (2025). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan .
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* .Bandung:Alfabeta
- Siregar, Syofian, 2020. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno Sadono, 2010, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tambunan, T. 2006. *Development Of Small and Medium Scale Industry Clusters In Indonesia*. Kadin Indonesia-Jetro.
- Tambunan, T. 2006, 2007b. *The Role of Government in Technology Transfer to SME Clusters in .Indonesia: Micro-level Evidence from The MetalWorking Industry Clusters in Tegal. (CentralJava)*.Asia-Pacific Perspective, VII (1).
- Todaro, M. C., Choudhuri, I., Belohlavek, M., Jahangir, A., Carerj, S., Oreto, L., & Khandheria, B. K. (2012). New echocardiographic

techniques for evaluation of left atrial mechanics. *European Heart Journal–Cardiovascular Imaging*, 13(12), 973-984.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.